



LAKIP 2025

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Arah Lagundri Km.7 Teluk Dalam

Email : perindagniassselatan@gmail.com

Kode Pos:22865



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran TUHAN yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan selama Tahun 2025, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 memuat informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan, serta Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dengan kurun waktu Tahun 2025-2029

Hasil pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni Masyarakat, Swasta dan Aparat. Pemerintah Daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan tidak sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan



saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan sehingga dapat bermanfaat dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025..

Telukdalam, Maret 2026

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nias Selatan



R. Martin Ley, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750316 199803 1 007



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggungjawab dalam membina dan mengendalikan urusan Pemerintahan atas Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah” bagian ke tiga urusan pemerintahan konkuren pasal 12 ayat (3) “urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dalam pasal 11 ayat (1) meliputi urusan perdagangan dan perindustrian maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah/Institusi Pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas kinerja dan tindakan yang telah dilaksanakan dalam menangani 2 urusan pilihan yang sudah ditetapkan dalam sasaran strategis, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. bahwa prinsip dasar akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja

Dalam rangka itu maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan



Tahun Anggaran 2025 merupakan kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01_5_57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan merupakan organisasi perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Tahun 2025 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut ditetapkan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024, Berdasarkan hasil pengukuran atas sasaran strategis tersebut, capaian kinerja memperlihatkan pencapaian yang sangat memuaskan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan yang telah di gariskan sebagai pelaksanaan program atau kegiatan dan sebagai pencapaian target berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dalam pelaksanaan tugasnya, mempunyai 18 Personil yang terdiri dari Sastra 2 (S2) sebanyak 7 orang (39%), Sastra 1 Sebanyak 7 orang (39%), Diploma 3 (D3) sebanyak 1 orang (6%) dan SMA sederajat sebanyak 3 orang (17%). Dari sisi akuntabilitas keuangan, Anggaran Dinas Perindustrian dan



Perdagangan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp1.600.885.018.-
dengan realisasi sebesar Rp1.420.821.265.- atau sebesar 88,75%

Telukdalam, 03 Maret 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nias Selatan



F. Martin Ley, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19750316 199803 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Sumber Daya Manusia	10
1.6 Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Rencana strategis	14
2.2 Visi dan Misi	15
2.3 Tujuan dan Sasaran.....	16
2.4 Indikator Kinerja Utama	17
2.5 Strategi Kebijakan	18
2.6 Rencana Kerja	19
2.7 Perjanjian Kinerja	28
2.8 Rencana Kinerja Tahunan	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	35
3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	36
3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024.....	41



3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah	48
3.4	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.....	42
3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	45
3.6	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	46
B.	REALISASI ANGGARAN.....	50
BAB IV	PENUTUP	53
4.1	Kesimpulan.....	53
LAMPIRAN.....		54



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Berdasarkan Kedudukan Dalam Organisasi	10
Tabel 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Eselon	10
Tabel 1.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	11
Tabel 1.4	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Tabel 2.1	Matriks Rencana Strategis	15
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator	17
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama	18
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan	18
Tabel 2.5	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.....	20
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan 2025	29
Tabel 2.7	Rencana Aksi 2025.....	33
Tabel 3.1	Analisis Pencapaian Kinerja	36
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	37
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2025.....	39
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024	41
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Renstra 2025-2029	42
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja	43
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
Tabel 3.8	Realisasi Program dan Kegiatan penunjang Sasaran Pertama	47
Tabel 3.9	Realisasi Program dan Kegiatan penunjang Sasaran Kedua.....	49
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	51
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Anggaran tahun 2025 dengan Tahun 2024	51
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2025	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8
Gambar 2.1	Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	15
Gambar 2.2	Pohon Kinerja Tahun 2025	30
Gambar 3.1	Dokumentasi Perencanaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.....	47
Gambar 3.2	Dokumentasi Monitoring dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.....	48



DAFTAR GRAFIK

Diagram 1.1	Data Pegawai Berdasarkan Kedudukan Dalam Organisasi	10
Diagram 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Eselon	10
Diagram 1.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	11
Diagram 1.4	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	11



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, bersih dan bertanggungjawab, dalam membina dan mengendalikan urusan pemerintahan atas bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai mana tercantum dalam undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah” bagian ketiga urusan pemerintahan konkuren pasal 12 ayat (3) “urusan pemerintah pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi urusan perdagangan dan perindustrian, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah/ Instansi Pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam menangani 2 urusan pilihan yaitu urusan perdagangan dan perindustrian yang sudah ditetapkan dalam sasaran strategis melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Nias Selatan, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan baik pada tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peratruran Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01_5_57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindstrian dan Perdagangan



Kabupaten Nias Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan merupakan organisasi perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagaimana dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah” pasal 72 ayat (1) butir (a) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, bahwa dalam urusan perindustrian, industri kecil menengah (IKM) merupakan salah satu ujung tombak perekonomian berbasis kerakyatan yang masih memerlukan pembinaan dan pendampingan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai instansi baik industri terkait, lembaga pemerintah maupun perguruan tinggi, IKM mempunyai peranan yang sangat strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, telah terbukti turut mewujudkan kemandirian ekonomi, Produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, akan tetapi masih banyak kendala dan hambatan yang harus dipecahkan untuk meningkatkan daya saing IKM Kabupaten Tangerang diantaranya terbatasnya akses permodalan, tingkat suku bunga pinjaman bank yang masih tinggi, terbatasnya pemasaran, inovasi IKM masih rendah dan tingkat penggunaan teknologi pada proses produksi juga masih tergolong belum maksimal.

Disamping tugas pembantuan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah. salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen



kinerja adalah pengukuran kinerja dalam usaha adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, hal ini dimaksudkan untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pencapaian pelaksanaan kegiatan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel dengan tujuan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang efisien, efektif, transparan sumberdaya aparatur yang berintergeritas, berkompetensi dan melayani masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Nias Selatan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025. Laporan akuntabilitas ini dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk capaian program/ kegiatan yang termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

1.2 TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dimaksudkan sebagai wujud laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Tahun Anggaran 2025. Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan



Perdagangan Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2025;

- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2025, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan di masa yang akan datang.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 Kedudukan dan Tugas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 01_5_57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan. Kedudukan Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas Pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

1.3.2 Fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perindustrian dan Perdagangan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Menteri teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya



1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Adapun susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Industri
 - a. Seksi Standarisasi, Desain Produk dan Promosi
 - b. Seksi Industri Mesin, Tekstil, Aneka Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika
 - c. Seksi Industri Agro dan Kimia
4. Bidang Perdagangan
 - d. Seksi Pembinaan Perdagangan Informal
 - e. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar
 - f. Seksi Pembinaan, Distribusi dan Pemasaran
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya masing-masing jabatan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan

Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perindustrian dan perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bersama OPD teknis.



- 2. Sekretaris,** mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggran di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub. Bagian, terdiri atas:

a) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Memiliki tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan barang, pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan

b) Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Memiliki tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, laporan dinas rencana kebutuhan anggaran, administrasi keuangan, laporan pengelolaan keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan.

- 3. Bidang Perindustrian,** mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perindustrian. Untuk melaksanakan tugas, bidang perindustrian melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perindustrian;
- b. Pelaksanaan kegiatan perindustrian;
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan perindustrian;



- d. Menetapkan rencana pembangunan industri kabupaten/kota;
- e. Penerbitan izin usaha kecil dan izin usaha industri menengah;
- f. Penerbitan IPUi bagi industri kecil dan menengah;
- g. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten/kota
- h. Menyiapkan laporan informasi industri untuk IUI kecil dan IUI menengah dan izin perluasannya serta IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten/kota;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang perindustrian dibantu 3 (tiga) seksi, terdiri atas :

a) Seksi Standarisasi, Desain Produk Dan Promosi mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis standarisasi dan desain produk;
- 2) Menyiapkan fasilitas pengembangan teknis standarisasi dan desain produk terkait pelaksanaan fasilitas pengembangan usaha industri pameran, promosi, misi dagang industri) dan pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM);
- 3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis standarisasi dan desain produk;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Logam, Mesin, Tekstil, Aneka Alat Transportasi, Elektronika Dan Telematika mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis industri logam, mesin, tekstil, aneka alat transportasi, elektronika dan telematika;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis industri logam, mesin, tekstil, aneka alat transportasi, elektronika dan



telematika, yaitu bahan pembinaan terhadap industri kecil menengah (IKM);

- 3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis industri logam, mesin, tekstil, aneka alat transportasi, elektronika dan telematika;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Agro Dan Kimia mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis industri agro dan kimia;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis agro dan kimia, yaitu bahan pembinaan terhadap industri kecil menengah (IKM);
- 3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis industri agro dan kimia;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas.

5) **Bidang Perdagangan**, mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas di bidang perdagangan. Untuk melaksanakan tugas, bidang perdagangan melaksanakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis perdagangan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan perdagangan;
- 3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan perdagangan;
- 4) Melakukan penerbitan perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- 5) Melaksanakan fasilitas sarana distribusi perdagangan;
- 6) Melaksanakan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan ekspor;
- 8) Menyiapkan dan melaksanakan standarisasi dan perlindungan konsumen,



- 9) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidangnya•

Bidang perdagangan dibantu 3 (tiga) seksi, terdiri atas:

a) **Seksi Pembinaan Pedagang Informal**, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pedagang informal;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan pedagang informal berupa pendataan usaha pedagang informal, dan koordinasi dengan instansi terkait untuk penataan dan pembinaan pedagang informal;
3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan pedagang informal;
4. Mengkoordinasikan penerbitan tanda daftar gudang, surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
Mengkoordinasikan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerimaan waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, dan penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) **Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Beredar**, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
3. Menyiapkan bahan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya tingkat daerah kabupaten/kota;
4. Menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;



5. Melaksanakan penerbitan surat keterangan asal (bagidaerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

c) Seksi Pembinaan, Distribusi, Dan Pemasaran mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, distribusi dan pemasaran;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan, distribusi dan pemasaran;
3. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
4. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kabupaten nias selatan;
5. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
6. Melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota;
7. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten/kota;
8. Melakukan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten Nias Selatan;
9. Melaksanakan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
10. Melaksanakan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);



11. Melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepalabidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis

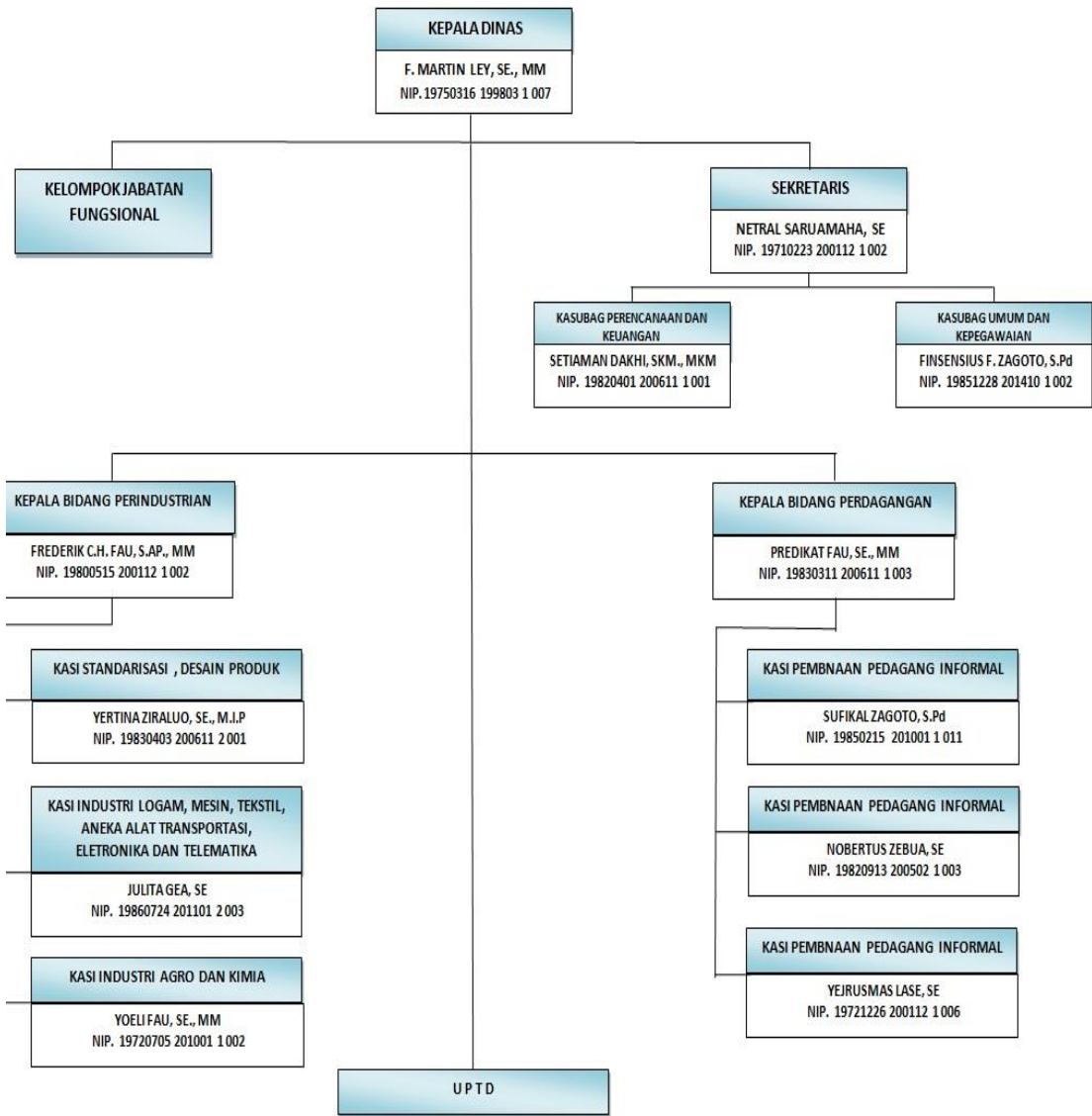
Dinas dapat membentuk unit pelaksana teknis sebagai pelaksana tugasteknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- 2) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah danberanggung jawab kepada kepala dinas.
- 3) Tenaga fungsional senior diangkat dan ditetapkan oleh kepaladinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan danprofesionalitas.
- 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan,beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Untuk lebih jelas serta memberi gambaran mengenai struktur organisasiDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan maka dapatdijelaskan sebagaimana gambar berikut dibawah ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan



Keadaan Januari s/d Desember 2025

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA



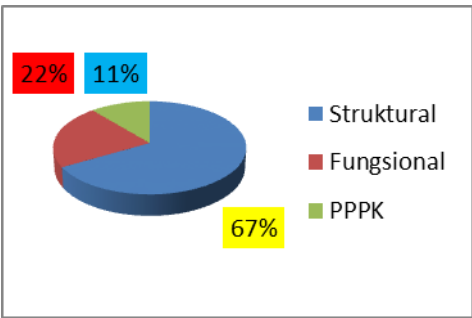
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung sumber daya manusia yang handal. Untuk itu, kompetensi dan kemampuan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang perlu terus ditingkatkan. Pada Tahun 2025 jumlah pegawai Dinas perindustrian dan Perdagangan sebanyak 18 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 16 orang dan PPPK sebanyak 2 orang. Jumlah pegawai berdasarkan uraian tugasnya selengkapnya dapat di lihat pada tabel dan diagram dibawah ini

Tabel 1.1

Diagram 1.1

Data Pegawai Berdasarkan Kedudukan Dalam Organisasi Data Pegawai Berdasarkan Kedudukan Dalam Organisasi

No	Uraian	2025	Peresentase
1	Struktural	12	67%
2	Fungsional	4	22%
3	PPPK	2	11%
Jumlah		18	100%



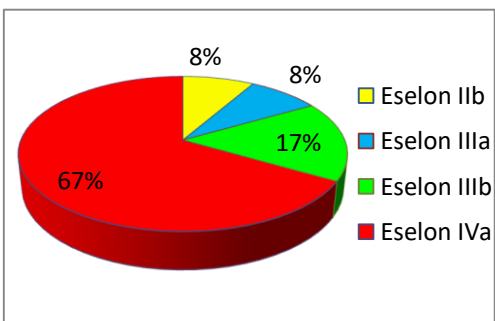
Sumber:Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan, per 31 Desember 2025

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat jabatan dapat dilihat pada tabel dan diagram dibawah ini:

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Eselon

Diagram 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Uraian	2025	Peresent ase
1	Eselon II b	1	8%
2	Eselon III a	1	8%
3	Eselon III b	2	17%
4	Eselon IV a	8	67%
Jumlah		12	100%



Sumber:Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan, per 31 Desember 2025

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel dan diagram dibawah ini:



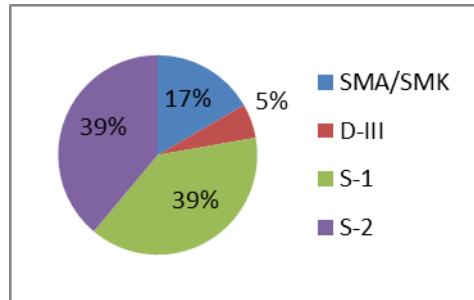
Tabel 1.3

Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	2025	Peresentase
1	SMA/SMK	3	17%
2	D-III	1	6%
3	S-1	7	39%
4	S-2	7	39%
Jumlah		18	100%

Diagram 1.3

Data Pegawai Berdasrkan Jenjang Pendidikan



Sumber:Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan, per 31 Desember 2024

Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel dan diagram dibawah ini:

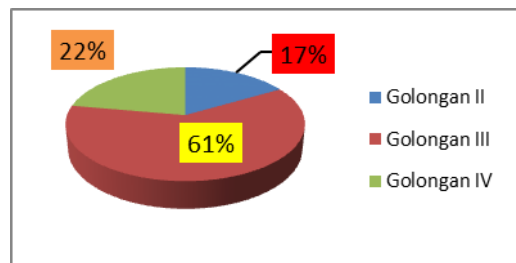
Tabel 1.4

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	2025	Peresentase
1	Golongan II	3	12%
2	Golongan III	11	65%
3	Golongan IV	4	23%
Jumlah		18	100%

Diagram 1.4

Data Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber:Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan, per 31 Desember 2025

1.6 ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan serta hasil telaahan Kementrian Lembaga, dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan antara lain:

1. Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Selatan menjadi



isu utama dalam rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan, rendahnya nilai produksi, kualitas produk belum baik, minimnya pertumbuhan industri baru menjadi akibat dari isu tersebut selain itu belum terwujudnya daya saing produk industri Kab. Nias Selatan dapat dilihat dari belum banyaknya produk industri yang menembus pasar luar baik itu nasional maupun Internasional. Bahkan untuk produk dalam negeri pun, produk kita masih belum memiliki daya saing. Hal tersebut dikarenakan produk yang kita hasilkan masih belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik dan berdaya saing tinggi terutama produk pangan, kerajinan tangan, dan lainnya. Jika kita lihat berdasarkan skala industri, Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu belum berkembangnya diversifikasi produk dan desain produk industri kerajinan mengakibatkan produk yang dibuat terkesan itu ke itu saja dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri.

2. Rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Selatan, besarnya penyerapan tenaga kerja pada sektor ini menjadi salah satu indikator meningkatnya sektor perdagangan di daerah. beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya kontribusi sektor perdagangan diantaranya rendahnya pembinaan pedagang, rendahnya keamanan produk dan keamanan perdagangan serta belum maksimalnya pelaksanaan pemasaran produk, masalah tersebut perlu diatasi melalui sasaran sehingga



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain beberapa hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan yang mempengaruhi faktor-faktor pelayanan berdasarkan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum adanya Sumber Daya Manusia penera, penyuluh industri, petugas pengawasan, pengelola dokumen SKA (Surat Keterangan Asal) dan pemilah arsip SKA yang berkualitas belum optimal;
2. Tidak tersedianya sarana prasarana alat UTTP;
3. Belum optimalnya potensi UTTP yang wajib tera/tera ulang bagi para pelaku usaha;
4. Belum termanfaatkannya teknologi informasi secara maksimal;
5. Rendahnya pengawasan sektor perindustrian dan perdagangan;
6. Masih rendahnya legalitas/ standarisasi dan produk pelaku IKM;
7. Belum optimalnya kemitraan IKM dengan industri besar;
8. Belum terpetakannya kawasan untuk pengembangan industri;
9. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam dan Luar Daerah, melalui peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan swasta dan swasta, swasta dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah, pengendalian fluktuasi atau gejolak harga-harga barang kebutuhan pokok.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun



melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Penetapan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 - 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 - 2029.

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 - 2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan



Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengemban dan mendukung Misi Misi Keempat yaitu,“ Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal”. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar 2.1

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

VISI	Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban
Misi MISI	Misi Keempat Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal
Tujuan TUJUAN	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor perdagangan dan industri
SASARAN	➤ Berkembangnya industry sektor pengolahan ➤ Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan di susun dan dirumuskan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029. Ddalamnya termasuk Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun, serta arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Tabel 2.1

Matriks Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Terlampir



2.2 VISI DAN MISI

Visi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban”. Visi tersebut kemudian dimanifestasikan kedalam 6 Misi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengemban dan mendukung dalam pelaksanaan Misi Keempat yaitu:

Misi Keempat : Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal :

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan tujuan utama berupa peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. Tujuan ini dijabarkan ke dalam tiga sasaran pembangunan, yaitu:

- (a) Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan secara berkelanjutan;
- (b) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan mandiri berbasis sumber daya lokal; serta
- (c) Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan berbasis potensi lokal.

Upaya peningkatan pendapatan per kapita dilakukan melalui penguatan ekonomi lokal yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan, dengan bertumpu pada pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Strategi utama yang diterapkan mencakup peningkatan ketahanan pangan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta optimalisasi sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

2.3.1 TUJUAN



Berdasarkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan yang berhubungan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

Misi Keempat : Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya local

Tujuan yang menjadi tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah “Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sector perdagangan dan industri”.

2.3.2 SASARAN

Sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan bersinergi. Untuk mewujudkannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan menetapkan Sasaran, dan indikator kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Berkembangnya industri sektor pengolahan	Persentase Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan (%)	Persen	0,25%
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan (%)	Persen	0,29%

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2025-2029

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat masing- masing Satuan Kerja.



Dalam mendukung keberhasilan Tujuan dan Sasaran yang telah di tetapkan tersebut, maka Dinas Perindustrian dan perdagangan merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum. Indikator Kinerja Utama di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029

Sasaran Strategis	INDIKATOR	SATU AN	Alasan	Formula	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen tase			0,19	0,20	0,22	0,23	0,25	0,26
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen tase			9,30	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80
Berkembang nya industri sektor pengolahan	Persentase Pertumbuha n sektor Industri Pengolahan	Persen tase		-	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35
Meningkatny a kontribusi sektor perdagangan	Persentase Pertumbuha n Sub Sektor Perdagangan	Persen tase		-	0,29	0,32	0,35	0,37	0,39	0,40

2.5 STRATEGI KEBIJAKAN



Untuk mncapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komperhensif yang nantinya diwujudkan dalam serangkaian arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Visi	:	Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal				
Misi 4	:	Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal				
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Meningk atnya nilai tambah dan daya saing sektor perdagangan dan industri	1.1	Meningk atnya kontribu si sektor perdagangan	1.1.1.	Meningkatkanan volume dan nilai realisasi ekspor	1.1.1.1	Meningkatkan daya saing produk dalam hal mutu, desain dan merk dagang produk lokal, dan memperkuat jaringan eksportir
			1.1.2	Meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengukuran dan pengawasan pada alat ukur, pengawasan peredaran barang yang dikonsumsi	1.1.1.2	Peningkatan perlindungan hak-hak konsumen sesuai kuantitas barang,
			1.1.3	Peningkatan pasar yang memenuhi persyaratan melalui penyediaan sarana pendukung	1.1.1.3	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perdagangan
			1.1.4	Pengendalian pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan/ pasar modern melalui penegakkan hukum dan pengawasan perizinan toko swalayan	1.1.1.4	Pengendalian pertumbuhan toko swalayan/ pasar modern



			1.1.5	Meningkatkan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan melalui sosialisasi dan penataan tempat berusaha pedagang kaki lima dan asongan	1.1.1.5	Optimalisasi tingkat pembinaan dan pengelolaan pasar tradisional yang memadai, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional.
			1.1.6	Pengolahan dan Penataan Distribusi Perdagangan	1.1.1.6	Peningkatan penataan pedagang kaki lima dan asongan
						Peningkatan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat, Optimalisasi ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau,
				Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan pasar rakyat		Mengadakan pembinaan, bimbingan teknis ataupun sosialisasi regulasi tentang pengelolaan pasar serta studi referensi di pasar percontohan
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing	1.2	Berkembangnya industri sektor pengolahan	1.1.7	Menyederhanakan sistem perizinan, pemungutan retribusi dan pemberdayaan pedagang di pasar rakyat dengan pemanfaatan teknologi informasi	1.1.1.7	Menyediakan aplikasi yang terintegrasi untuk melayani perizinan pedagang, pemungutan dan pelaporan retribusi serta pusat aduan pedagang
			1.2.1	Meningkatkan kapasitas SDM tentang desain, inovasi produk, pemasaran dan pengembangan	1.2.1.1	Meningkatkan Pemanfaatan bahan baku lokal dan Pengembangan Industri sesuai



sektor perdagangan dan industri			1.2.2	jaringan pemasaran produk IKM		dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan
				Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pemasaran produk IKM, Peningkatan nilai tambah produk IKM dan Peningkatan Investasi Industri	1.2.1.2	Pengembangan Sistem Inovasi teknologi Industri
						Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
						Meningkatkan sarana prasarana layanan teknis dan mesin dan Meningkatkan jaringan pengendalian mutu dan sertifikasi pada industry kreatif, Peningkatan kuantitas dan kualitas produk Industri, Penguatan kelembagaan IKM
						Optimalisasi sistem informasi industri nasional, pemanfaatan website dan media social
			1.2.3	Peningkatan izin usaha IKM	1.2.1.3	Peningkatan kualitas dan penyederhanaan perizinan

2.6 RENCANA KERJA

Berdasarkan pada Visi, Misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, telah tertuang didalam dokumen Rencana Kerja sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri No 81 Tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi antara



perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2025 dilakukan perubahan Renja.

Alasan mendasar dilakukannya perubahan Rencana Kerja PD tahun 2025 adalah:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- c. Adanya pergeseran – pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja. Tabel Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. NIAS SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENGANGGUR JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	11					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							1.500.000.000,00	1.517.590.300,00	2.537.885.017,50	1.037.885.017,50							2.367.307.117,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.500.000.000,00	1.517.590.300,00	2.537.885.017,50	1.037.885.017,50							2.367.307.117,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							1.350.000.000,00	1.199.197.400,00	2.317.273.517,50	967.273.517,50							2.287.307.117,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan SUP				60,00 Persen	60,00 Persen	15.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00							40.000.000,00	
	3.30.02.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Lini Usaha Toko Swastany	Jumlah dan Pengawasan Pasar Rakyat				40 Dokumen	40 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swastany Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemeriksaan Kebutuhan Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swastany Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				40 Dokumen	40 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase barang beredar yang layak yang sesuai perundang undangan				85,00 Persen	85,00 Persen	195.000.000,00	350.000.000,00	1.260.709.500,00	-124.706.966,00							70.293.034,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya sarana distribusi perdagangan bagi masyarakat Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan Bagi masyarakat				7 Unit	7 Unit	195.000.000,00	350.000.000,00	1.260.709.500,00	1.065.709.500,00			-	-	-		70.293.034,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	7 Unit	105.000.000,00	350.000.000,00	1.060.709.500,00	955.709.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.293.034,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	200.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kinerja realisasi pupuk				85,00 Persen	85,00 Persen	240.000.000,00	90.549.000,00	545.173.000,00	-25.000.000,00							215.000.000,00	
	3.30.04.2.01	Mengamati Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya barang kebutuhan pokok bagi Masyarakat Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat				105 Laporan	105 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				35 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Adanya Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Adanya Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota				41 Laporan	41 Laporan	140.000.000,00	44.892.000,00	522.456.000,00	382.456.000,00			-	-	-		115.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				30 Laporan	30 Laporan	50.000.000,00	44.892.000,00	22.456.000,00	-27.544.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Rutin dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Rutin dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	500.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Kabupaten / Kota Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Kabupaten/Kota				30 Laporan	70 Laporan	50.000.000,00	45.657.000,00	22.717.000,00	-27.283.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Pengaliran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengaliran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Resolusi Minimal 80%				25 Laporan	25 Laporan	50.000.000,00	45.657.000,00	22.717.000,00	-27.283.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PELINDUNGAN KONSUMEN	-				-	-	50.000.000,00	51.616.500,00	25.808.250,00	-50.000.000,00							0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB	
							TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023				NASIONAL	DAERAH					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.30.06.2.01	Penaksanaan Metrologi Legal, Berapa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	50.000.000,00	51.616.500,00	25.808.250,00	-24.191.750,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.06.2.01.0001	Penaksanaan Metrologi Legal, Berapa Tera, Tera Ulang													-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATENKOTA	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan, kecapaian dan pengelolan barang milik daerah yang akurat dan transparan Nilai Lakip OPD				100 8 Persen Predikat	100 8 Persen Nilai Predikat	850.000.000,00	707.031.900,00	485.582.767,50	1.112.014.083,00				-	-		1.962.014.083,00		
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan				8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000,00	36.706.000,00	18.353.000,00	-11.647.000,00			-	-	-		48.000.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.641.500,00	2.820.750,00	-2.179.250,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.500.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.932.500,00	2.966.250,00	-2.033.750,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.500.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	6.134.500,00	3.067.250,00	-1.932.750,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.500.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	6.250.500,00	3.125.250,00	-1.874.750,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.500.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	6.364.500,00	3.182.250,00	-1.817.750,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.500.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	6.382.500,00	3.191.250,00	-1.808.750,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.500.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dihasilkan				19 Laporan 5 Laporan	19 Laporan 5 Laporan	73.840.000,00	77.328.296,00	74.584.062,50	744.062,50			-	-	-		847.337.083,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Uang yang Menempati Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	4 Orang/bulan	63.840.000,00	63.840.296,00	67.890.062,50	4.050.062,50	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		932.337.083,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	6.694.000,00	3.347.000,00	-1.653.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.500.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	6.694.000,00	3.347.000,00	-1.653.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.500.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dimiliki Perangkat Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Diakuisisi Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	-	-		30.000.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.03.0003	Koordinasi dan Pembelian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembelian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pembelian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.03.0006	Pembastusahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembastusahan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SKPD-RI : diolah pada 2023-09-15 13:09:18

Halaman 2



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUA OPD	6	7	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)		RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2023	APBD 2023					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah				25 Orang	25 Orang	45.000.000,00	59.127.829,00	0,00				-	-	-		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakan Dinas beserta Akibat Kologkapannya	Jumlah Pakan Pakan Dinas beserta Akibat Kologkapannya				25 Paket	25 Paket	20.000.000,00	34.127.829,00	0,00		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	437.160.000,00	286.296.125,00	182.316.505,00				-	-	-		615.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	8.974.875,00	6.280.135,00		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	80.000.000,00	86.708.500,00	63.353.600,00		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	23.512.730,00	29.506.730,00		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	267.100.000,00	167.102.000,00	63.176.000,00		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah				20 Unit	20 Unit	63.000.000,00	52.426.650,00	35.953.200,00				-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	52.426.650,00	35.953.200,00		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	23.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Tersedia				100 %	100 %	96.000.000,00	105.900.000,00	102.900.000,00				-	-	-		191.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1500 Laporan	1500 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	81.000.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			174.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

SKPD-RI : diupload pada 2023-09-15 13:09:16

Halaman 3



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT GAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH		APBD 2025	NASIONAL					DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Bangun Mula Daerah pemungutan Urusan Pemertahanan Daerah	Jumlah Bangun Mula Daerah yang di pemertahan Urusan Bangun Mula Daerah yang dipertah				17 Lini	17 Lini	70.000.000,00	89.345.000,00	71.476.000,00	1.476.000,00			-	-	-		49.177.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemertahan	Jumlah Jasa Pemertahan				1 Lini	1 Lini	45.000.000,00	42.500.000,00	93.856.000,00	-11.144.000,00	Kab. Nias Selatan, Sumut Kemendagri, Sumut KIRIDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		49.177.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.09.0009	Pemertahan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki dan Pemertahan				1 Lini	1 Lini	25.000.000,00	47.025.000,00	57.620.000,00	12.620.000,00	Kab. Nias Selatan, Sumut Kemendagri, Sumut KIRIDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
1.	3.31	URUSAN PEMERTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							150.000.000,00	318.392.900,00	220.611.500,00	70.611.500,00				-	-		89.000.000,00			
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Yang Terselesaikan Terhadap dokumen RPK menjadi Peta				100 Ada Persen	100 Ada Persen	50.000.000,00	232.925.900,00	213.851.500,00	0,00				-	-		50.000.000,00			
	3.31.02.2.01	Pengembangan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengukuran dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	232.925.900,00	213.851.500,00	163.851.500,00				-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembendayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembendayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	232.925.900,00	213.851.500,00	163.851.500,00	Kab. Nias Selatan, Sumut Kemendagri, Sumut KIRIDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.03	PROGRAM PENGALIAN UIN USAHA INDUSTRI	Perentase pelaku usaha yang mengikuti UIN sesuai dengan ketentuan					50,00 Persen	50,00 Persen	50.000.000,00	36.656.000,00	1.743.000,00	-50.000.000,00				-	-		0,00		
	3.31.03.2.01	Pembentukan Unit Usaha Industri (UUI), Unit Usaha Industri (UUI), dan Unit Usaha Industri (UUI) dan Unit Usaha Industri (UUI)	Jumlah Dokumen Pembentukan UUI, UUI, dan UUI Kabupaten/Kota Pembentukan UUI, UUI, dan UUI Kabupaten/Kota Pembentukan UUI, UUI, dan UUI Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	36.656.000,00	1.743.000,00	-48.257.000,00				-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.03.2.01.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Usaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Usaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	36.656.000,00	1.743.000,00	-48.257.000,00	Kab. Nias Selatan, Sumut Kemendagri, Sumut KIRIDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Perentase Data Informasi Industri Yang Terupdate dan Terakutansi				100 Ada Persen	100 Ada Persen	50.000.000,00	48.811.000,00	5.017.000,00	-20.000.000,00				-	-		30.000.000,00			
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk UUI, UUI, UUI, dan UUI Kabupaten/Kota	Terdapatnya Informasi Industri untuk UUI, UUI, UUI, dan UUI Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	48.811.000,00	5.017.000,00	-44.583.000,00				-	-	-	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.04.2.01.0001	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIRIS)	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIRIS)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	48.811.000,00	5.017.000,00	-44.583.000,00	Kab. Nias Selatan, Sumut Kemendagri, Sumut KIRIDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
J U M L A H									1.500.000.000,00	1.517.590.300,00	2.537.865.017,50	1.037.865.017,50				-	-		2.367.307.117,00			

SUPD-RP : dibuat pada 2025-09-19 13:09:10

Halaman : 4

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025



2.7 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 - 2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal Dua. bulan Januari Tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparasi dan Kinerja Aparatur.



2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dengan Bupati Nias Selatan dan besaran anggaran yang direncanakan melalui program/kegiatan Tahun 2025 sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Disperindag (Evaluasi Internal)	Persen	B
2	Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	0,20%
3	Meningkatkan kontribusi sektor	Persentase kontribusi sektor perdagangan	Persen	9,30 %



	perdagangan	terhadap PDRB (ADHB)		
--	-------------	-------------------------	--	--

ANGGARAN PERUBAHAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

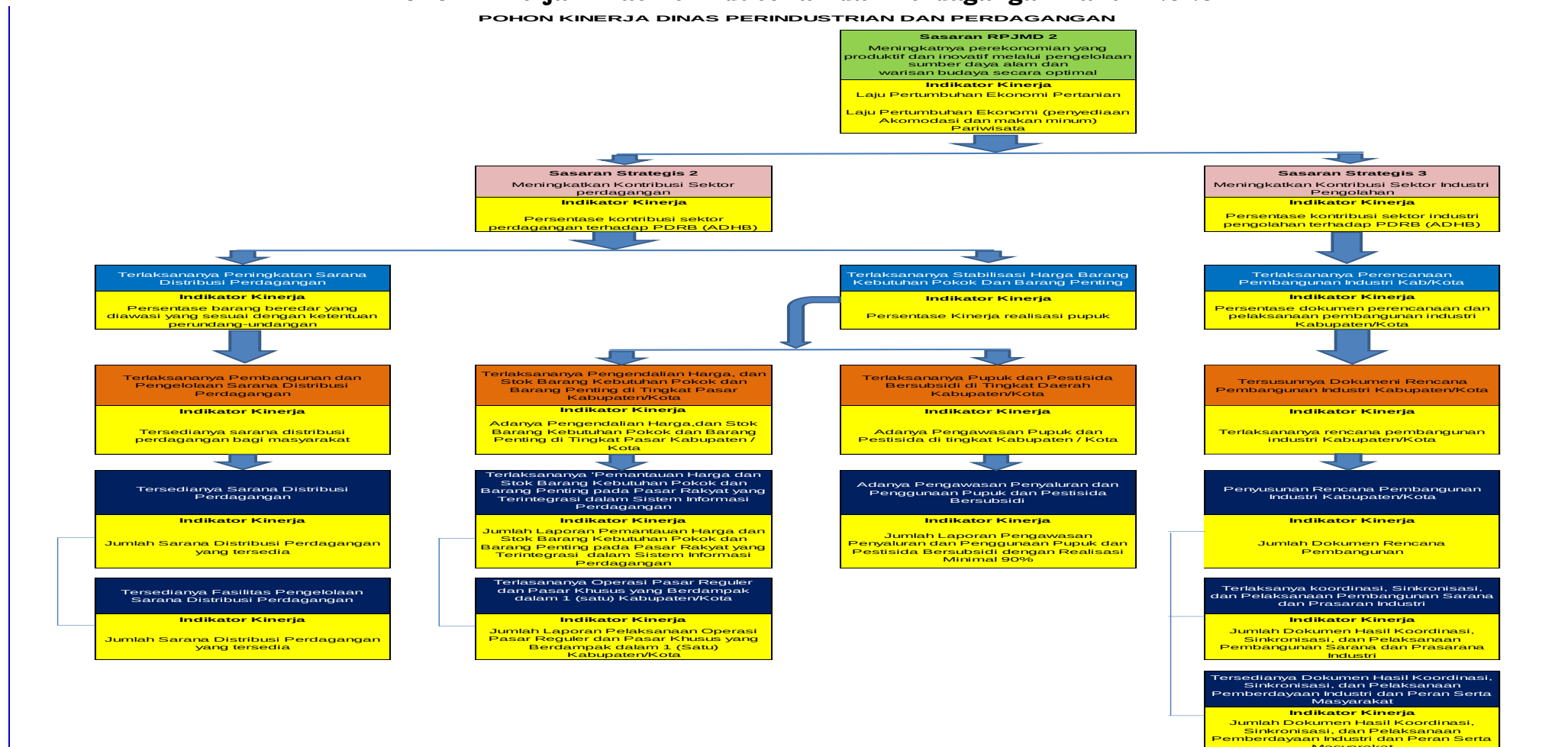
NO	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	466.382.767
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	342.909.500
3	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	545.173.000
4	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	25.808.250
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	213.851.500
6	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1.743.000
7	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	5.017.000
Jumlah		1.600.885.017

2.8 RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan yang akan dicapai oleh satuan kerja perangkat daerah pada Tahun berjalan. Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 dan tabel Rencana Aksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dibawah ini:



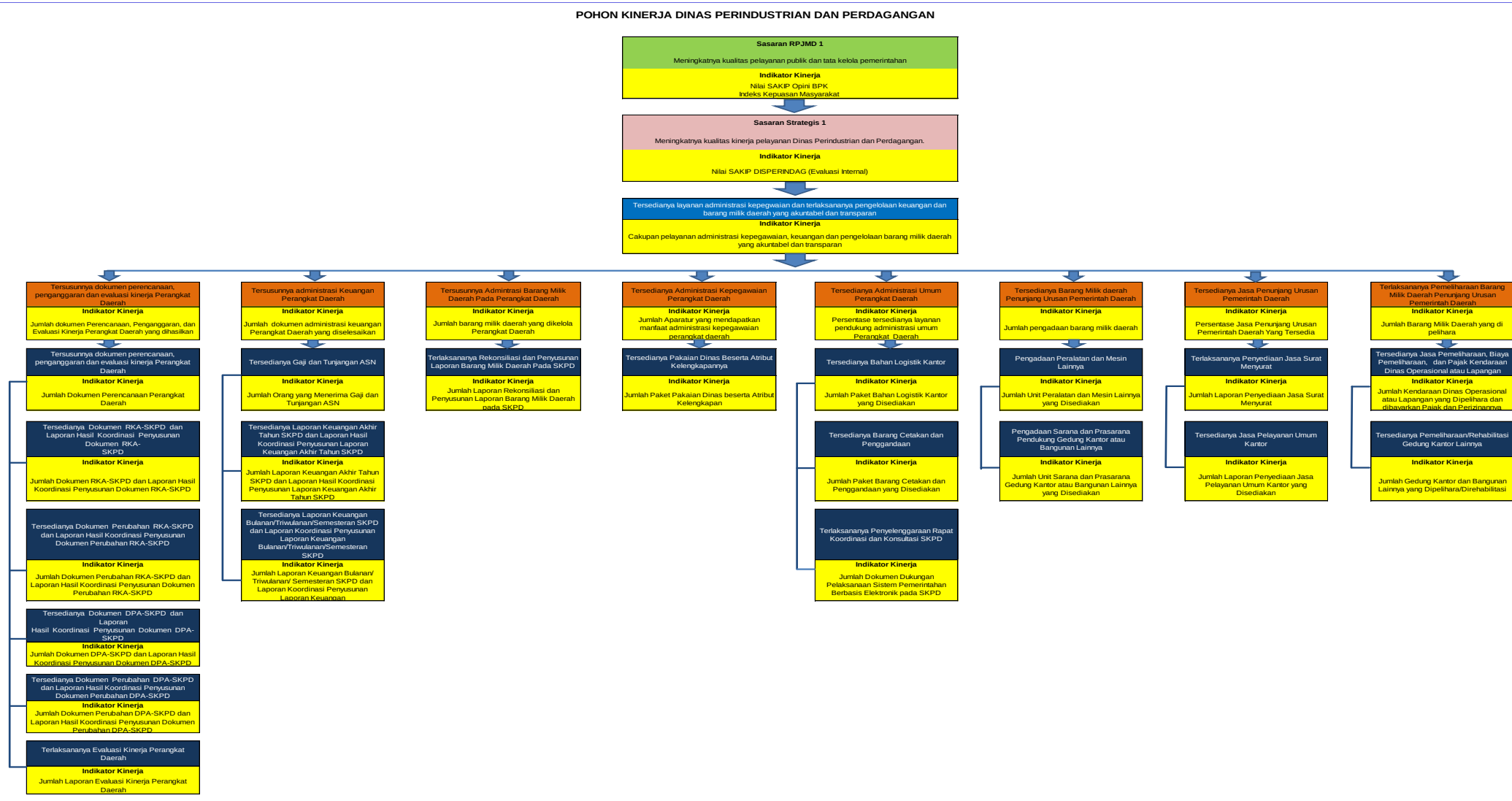
Gambar 2.2
Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025





PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

POHON KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN





Rencana Aksi merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu, dan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD.

Rencana Aksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.7
Rencana Aksi Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase dokumen perencanaan dan Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu	Target akhir dan satuan		Tersedianya layanan administrasi kepegawaian dan terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang akuntabel dan transparanProgram Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Target akhir dan satuan		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Target akhir dan satuan	
			TW I	25%			TW I	25%			TW I	3 dok
											TW II	2 dok
											TW III	1 dok
									TW IV	2 dok		
			TW II	25%			TW II	25%	Tersusunnya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Diselesaikan	Target akhir dan satuan	
											TW I	1 dok
											TW II	1 dok
											TW III	1 dok
			TW III	25%			TW III	25%	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian perangkat daerah	TW IV	2 dok
											Target akhir dan satuan	
											TW I	N/A
											TW II	25 org
			TW IV	25%			TW IV	25%	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	TW III	N/A
											TW IV	N/A
											Target akhir dan satuan	
											TW I	25%
			TW IV	25%			TW IV	25%	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	TW II	25%
											TW III	25%
											TW IV	25%
											Target akhir dan satuan	
			TW IV	25%			TW IV	25%	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	TW I	N/A
											TW II	2 unit
											TW III	N/A
TW IV	N/A											
TW IV	25%	TW IV	25%	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	Target akhir dan satuan						
						TW I	25%					
						TW II	25%					
						TW III	25%					
TW IV	25%	TW IV	25%	Tersedianya sarana distribusi perdagangan bagi masyarakat		TW IV	25%					
						Target akhir dan satuan						
						TW I	N/A					
						TW II	N/A					
TW IV	25%	TW IV	25%	Tersedianya sarana distribusi perdagangan bagi masyarakat		TW III	1 unit					
						TW IV	N/A					
						Target akhir dan satuan						
						TW I	N/A					
			Target akhir dan satuan		Terlaksananya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Target akhir dan satuan		Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Target akhir dan satuan	
		TW I	N/A	TW I			N/A					
				TW II			2 unit					
				TW III			2 unit					
				TW IV			3 unit					



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2	Meningkatkan Kontribusi Sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	TW II	N/A	Terlaksananya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Kinerja realisasi pupuk	Target akhir dan satuan		Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Target akhir dan satuan					
							TW I	20%			TW I	10 lap				
							TW II	25%			TW II	10 lap				
							TW III	15%			TW III	11 lap				
			TW III	N/A							TW IV	15%	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten / Kota	Target akhir dan satuan	
															TW I	10 lap
															TW II	10 lap
															TW III	5 lap
			TW IV	9,30%	Terlaksananya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Target akhir dan satuan		Terlaksananya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Meterologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Target akhir dan satuan					
							TW I	25%			TW I	N/A				
							TW II	25%			TW II	1 lap				
							TW III	25%			TW III	1 lap				
3	Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	Target akhir dan satuan		Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri Kabupaten/Kota)	Target akhir dan satuan		Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Target akhir dan satuan					
			TW I	N/A			TW I	15%			TW I	N/A				
							TW II	25%			TW II	1 dok				
							TW III	20%			TW III	2 unit				
							TW IV	15%	TW IV	1 dok						
			TW II	N/A	Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Target akhir dan satuan		Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penerbitan IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Target akhir dan satuan					
							TW I	N/A			TW I	N/A				
							TW II	20%			TW II	N/A				
							TW III	20%			TW III	1 dok				
			TW III	N/A							TW III	10%			TW IV	N/A
															Target akhir dan satuan	
										TW I	25%	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI Kewenangan Kabupaten / Kota	TW I	N/A	
										TW II	25%			TW II	1 dok	
					TW III	25%				TW III	1 dok					
					TW IV	25%				TW IV	1 dok					

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Dalam pengukuran perlu dilakukan analisis capaian kinerja organisasi agar lebih baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu: data internal berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi dan data eksternal berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggungjawab. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara regular.

Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Pengukuran kinerja Dinas



Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 mencakup pengukuran kinerja sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026.

Untuk menetapkan hasil analisis pencapaian kinerja dalam satu Organisasi Perangkat Daerah, maka sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya maka telah menetapkan standar penilaian dengan skala pengukuran ordinal yang dapat kita lihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Analisis Pencapaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan Puluh Lima Persen Sampai Dengan Seratus Persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d <85%	Tujuh Puluh Persen Sampai Dengan Kurang Delapan Puluh Lima Persen	Berhasil
3	55% s.d <70%	Lima Puluh Lima Persen Sampai Dengan Kurang Tujuh Puluh Persen	Cukup Berhasil
4	<55%	Kurang Lima Puluh Lima Persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Target dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja perangkat daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor perdagangan dan industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	0.19	0.17	89%	BPS
2		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	9.3	9.40	101%	BPS
3	Berkembangnya industri sektor pengolahan	Persentase Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	0.25	0	0%	BPS
4	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan	0.29	0.23	79%	BPS

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas dapat di jelaskan capaian dari masing – masing indikator kinerja utama dan target capaian sebagai berikut :

- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dengan target yang telah ditetapkan pada indikator ini adalah 0.19. Realisasi dari indikator kinerja utama yaitu sebesar 0,17%. Capaian Kinerja indikator Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun tahun 2025 yaitu 89%.
- Indikator kinerja utama yang kedua yaitu, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan target yang telah di tetapkan yaitu sebesar 9.3%. Realisasi dari indikator kinerja utama yaitu sebesar 9.40%. Capaian Kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun tahun 2025 yaitu 101%.

Berdasarkan capaian tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan telah berupaya dalam mencapai dan melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

- Indikator yang ketiga yaitu Persentase Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan dengan target sebesar 0.25%. Realisasi dari indikator kinerja utama yaitu sebesar 0%. Capaian kinerja dari indikator Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) dari target yang telah di tentukan yaitu sebesar 0%. Hasil ini di dapatkan berdasarkan data yang di terbitkan oleh BPS dimana data tersebut masih bersifat sangat sementara. Faktor penghambat yang membuat capaian kinerja belum maksimal yaitu, tidak adanya kegiatan yang sangat signifikan dalam menunjang pertumbuhan industri, sehingga ini menjadi evaluasi dalam perencanaan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan industri di Kabupaten Nias Selatan.

- d. Indikator kinerja utama yang ke empat yaitu, Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0.29%. Realisasi dari indikator kinerja utama yaitu sebesar 0.23%. Capaian Kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2025 yaitu 79%.

Berdasarkan capaian tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan telah berupaya dalam mencapai dan melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis organisasi yang termuat dalam Perjanjian Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2025

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Formulasi Perhitungan (4)	Target (5)	Realisasi (6)	Capaian (%) (7)	Sumber Data (8)
1	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Disperindag (Evaluasi Internal)	Penilaian oleh APIP/Inspektorat	B			Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nias Selatan
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	jumlah PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB) dibagi jumlah total PDRB di kali 100%	0.19%	0.17%	89%	BPS
3	Meningkatkan Kontribusi Sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	jumlah PDRB sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) dibagi jumlah total PDRB di kali 100%	9.20%	9.40%	102%	BPS

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas dapat di jelaskan capaian dari sasaran strategis dan masing-masing indikator target capaian sebagai berikut :

1. Sasaran Strageis Pertama yaitu, “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdaagan”, memiliki satu indikator kinerja yaitu, Nilai SAKIP Disperindag (Evaluasi Internal). Untuk realisasi kinerja tahun 2025 belum bisa disajikan berhubung karena nilai SAKIP tahun 2025 baru keluar nilai hasil reviuwnya dari inspektorat di perkirakan pada bulan April 2025, akan tetapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan optimis bahwa nilai atau target yang telah di tetapkan yaitu Nilai “B” pasti akan tercapai dengan berpedoman pada nilai akhir Lakip tahun 2024 dengan nilai A.
2. Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan, memiliki satu indikator kinerja yaitu, Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB). Realisasi dari indikator kinerja utama yaitu sebesar 0,17%.



Capaian Kinerja indikator Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB) pada tahun 2025 yaitu 89%.

Berdasarkan capaian tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan telah berupaya dalam mencapai dan melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

3. Sasaran Strategis ketiga yaitu Meningkatkan Kontribusi Sektor perdagangan, memiliki satu indikator kinerja yaitu, Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB). Realisasi dari indikator kinerja utama yaitu sebesar 9,40%. Capaian kinerja dari indikator Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 102%.

Berdasarkan capaian tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan telah berupaya dalam mencapai dan melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

3.2 Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan Tahun 2025

Untuk perbandingan data capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya nilai tambah	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	0.19	0.18%	0.95%	0.19	0.17	89%
2	dan daya saing sektor perdagangan dan industri	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	9.3	9.07%	0.98%	9.3	9.40	101%
3	Berkembangnya industri sektor pengolahan	Persentase Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	Persen	0.25	N/A	N/A	0.25	0	0%
4	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan	Persen	0.29	N/A	N/A	0.29	0.23	79%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat mempertahankan capaian kinerjanya.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

Untuk perbandingan data capaian kinerja Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan selama 5 (lima) tahun sesuai Renstra 2025-2029 dapat di lihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Jangka Menengah 2025-2029

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis 2029	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor perdagangan dan industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	0.17	0.26	65%
2		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	9.40	9.8	96%
3	Berkembangnya industri sektor pengolahan	Persentase Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	0	0.35	0%
4	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan	0.23	0.4	57.5%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

1. Target Jangka Menengah pada akhir Periode RPJMD pada indikator Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB yaitu 0.26%. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 0,17% maka tingkat realisasi kinerjanya yaitu sebesar 65%.
2. Target Jangka Menengah pada akhir Periode RPJMD pada indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB yaitu sebesar 9.8%. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 9.40% maka tingkat realisasi kinerjanya yaitu sebesar 96%.
3. Target Jangka Menengah pada akhir Periode RPJMD pada Indikator Persentase Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 0.35%. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 0% maka tingkat realisasi kinerjanya yaitu sebesar 0%.
4. Target Jangka Menengah pada akhir Periode RPJMD pada Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan yaitu sebesar 0.40%. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 0.23% maka tingkat realisasi kinerjanya yaitu sebesar 57.5%.

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Dilakukan

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2025. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dan sebab-sebab tercapai/tidak tercapainya kinerja yang diharapkan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi			
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor perdagangan dan industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	0.19	0.17	89%	adanya kerja sama dan dukungan yang baik dari setiap bidang dan pimpinan dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan	menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan
2		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	9.3	9.40	101%	Adanya dukungan dari pimpinan kepada ASN untuk melaksanakan kegiatan dan kerjasama yang baik dari setiap bidang	menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan
3	Berkembangnya industri sektor pengolahan	Persentase Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	Persen	0.25	0	0%	Faktor penghambat yang membuat capaian kinerja belum maksimal yaitu, tidak adanya kegiatan yang sangat signifikan dalam menunjang pertumbuhan industri, sehingga ini menjadi evaluasi dalam perencanaan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan industri di Kabupaten Nias Selatan.	menyusun program dan kegiatan yang mendukung peningkatan pertumbuhan industri
4	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan	Persen	0.29	0.23	79%	Adanya dukungan dari pimpinan kepada ASN untuk melaksanakan kegiatan dan kerjasama yang baik dari setiap bidang	menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi Kabupaten Nias Selatan yang juga menjadi Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan yang berbunyi: “Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Berkeadaban”. Evaluasi dan

analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

- ❖ **Misi ke-Empat:** “Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal”

Sasaran Strategis Pertama : Berkembangnya industri sektor pengolahan

Pada Sasaran Strategis kedua terdapat 1 indikator kinerja, yaitu :

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
Persentase Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	0.25%	0%	0%	Kurang berhasil

Sasaran Strageis pertama pada indikator Persentase Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan pada tahun 2025 di targetkan sebesar 0.25% dengan realisasi mencapai 0.%. Faktor penghambat yang membuat capaian kinerja belum maksimal yaitu, tidak adanya kegiatan yang sangat signifikan dalam menunjang pertumbuhan industri, sehingga ini menjadi evaluasi dalam perencanaan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan industri di Kabupaten Nias Selatan.

Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan

Pada Sasaran Strategis kedua terdapat 1 indikator kinerja, yaitu :

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan	0.29%	0.23%	79%	berhasil

Sasaran Strageis kedua pada indikator Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan pada tahun 2025 di targetkan sebesar 0.29% dengan realisasi mencapai 0.23%. Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran stragis ini yaitu, adanya kerja sama dan dukungan yang baik dari setiap bidang dan pimpinan dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja pada indikator sasaran strategis. Pada indikator sasaran strategis ini hampir tidak ditemukan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.



Gambar 3.2.: Dokumentasi Monitoring dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan sumber Daya Berdasarkan pengukuran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan sumber Daya

Evaluasi Penguasaan Sumber Daya												
No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Anggaran 2024					
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (AA)	Realisasi (RA)	AA X COP	(AA X COP)-RA	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=6/5	(8)	(9)	(10)=(8)X(7)	(11)=(10)-(9)	(12)=(9)/(8)	
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor perdagangan dan industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	0.19	0.17	89%	110,305,750	69,396,548	98,694,618	29,298,070	62.91%	
2		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	9.3	9.40	101%	690,136,759	641,014,085	697,557,584	56,543,500	92.88%	
3	Berkembangnya industri sektor pengolahan	Persentase Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	Persen	0.25	0	0%	110,305,750	69,396,548	-	69,396,548	62.91%	
4	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan	Persen	0.29	0.23	79%	690,136,759	641,014,085	547,349,843	-	93,664,241	92.88%
Jumlah							1,600,885,018	1,420,821,265	1,343,602,046	-	77,219,219	
Σ((AA X COP)-RA)/Σ(AA)									-5%			



1. Penggunaan sumber daya anggaran pada indikator Pertama telah mencapai 62.91%. Hal dikarenakan penggunaan anggaran diperuntukkan dalam mendukung seluruh program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja utama.
2. Penggunaan sumber daya anggaran pada Sasaran kedua telah mencapai 92.88%. Hal dikarenakan penggunaan anggaran diperuntukkan dalam mendukung seluruh program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja kedua.
3. Penggunaan sumber daya anggaran pada Sasaran ketiga telah mencapai 62.91%. Hal dikarenakan penggunaan anggaran diperuntukkan dalam mendukung seluruh program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja ketiga.
4. Penggunaan sumber daya anggaran pada Sasaran keempat telah mencapai 92.88%. Hal dikarenakan penggunaan anggaran diperuntukkan dalam mendukung seluruh program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja keempat.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan program/kegiatan sebagai berikut :

Sasaran Pertama : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Capaian kinerja program pada Sasaran Strategis Pertama :

NO	Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Akuntabel Dan Transparan	100%	100%
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	0.14%
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Kinerja realisasi pupuk	80%	60.6%
4	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	80%	80%

Dari 4 (4) Program tersebut terdiri dari 11 (sebelas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub kegiatan. Berikut Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang Sasaran Pertama :



Tabel 3.8
Realisasi Program dan Kegiatan penunjang Sasaran Pertama

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	
		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100	%	100 %	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8	Dok	10	Dok
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	3	Dok
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	1	Dok
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	1	Dok
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	1	Dok
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	1	Dok
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dok	4	Dok
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	5	Dok	5	Dok
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bln	14	Bln
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok	1	Dok
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4	Dok	4	Dok
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100	%	100	%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	10	Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12	Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12	Laporan	12	Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	2	Unit	1	Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	1	Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintahan yang Tersedia	100	%	100	%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	Laporan	1200	Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	0	Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9	Laporan	10	Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	1	Unit	4	Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	3	Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit



PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	%	0.14	%
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya sarana distribusi perdagangan bagi masyarakat	7	Unit	1	Unit
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2	Unit	1	Unit
Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5	Unit	0	Unit
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kinerja realisasi pupuk	80	%	60.6	%
<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	<i>Adanya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota</i>	31	Laporan	31	Laporan
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	30	Laporan	30	Laporan
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten / Kota	25	Laporan	25	Laporan
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	25	Laporan	25	Laporan
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	80	%	80	%
Pelaksanaan Meterologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Meterologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	3	Laporan	1	Laporan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Meterologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	3	Unit	3	Unit

Sasaran Kedua : Berkembangnya industry sektor pengolahan

Capaian kinerja program pada Sasaran Strategis Kedua :

NO	Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Yang terselesaikan	100%	100%
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	50%	50%



	Kabupaten/Kota	sesuai dengan ketentuan		
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Data Informasi Industri Yang Ter-update	100%	50%

Dari 3 (tiga) Program tersebut terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub kegiatan. Keberhasilan program dari sasaran kedua ini dikarenakan kerjasama dan kontribusi dari bidang masing-masing dalam melaksanakan kegiatannya. Berikut Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang Sasaran kedua :

Tabel 3.9
Realisasi Program dan Kegiatan penunjang Sasaran Kedua

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Yang Terselesaikan	100	%	100	%
Penyusunan dan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Terlaksananya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	1	Dok	1	Dok
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dok	1	Dok
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	50	%	50	%
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Tersedianya Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	5	Dok	4	Dok
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negri dan selain Bidang Usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	5	Dok	4	Dok
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri Yang Ter-update	100	%	50	%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI Kewenangan Kabupaten / Kota	3	Dok	1	Dok
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINaS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINaS)	1	Dok	1	Dok

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025, bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp1.600.885.017,50,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar



Rp1.295.382.817,50,- dan Belanja Modal sebesar Rp305.502.200,-. Realisasi Belanja Tahun 2025 sebesar Rp1.420.941.565,- (88,76%), yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.144.467.616,- (88,35%), dan Belanja Modal sebesar Rp276.473.949 (90,50%)

Berikut Tabel Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	Rp1.295.382.817,50	Rp1.144.467.616	88,35%
2	Belanja Modal	Rp305.502.200	Rp276.473.949	90,50%
3	Total Anggaran	Rp1.600.885.017,50	Rp1.420.941.565	88,76%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Realisasi belanja daerah pada tahun 2025 adalah 88,76% bila di bandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 96,24% Berikut perbandingan realisasi anggaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Anggaran tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Uraian	Target		Realisasi		%	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Belanja Operasi	968.314.150	1.295.382.817,5	931.371.688	1.144.467.616	96,18%	88,35%
2	Belanja Modal	14.285.850	305.502.200	14.285.850	276.473.949	100%	90,50%
3	Total Anggaran	982.600.000	1.600.885.017,5	945.657.538	1.420.941.565	96,24%	88,76%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024



BAB IV

PENUTUP

1.6 KESIMPULAN

Laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2025. Dalam rencana kinerja tahun 2025 ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan diharapkan dengan sangat untuk berperan dalam mengkondisikan sistem perdagangan yang sehat atau terwujudnya stabilitas harga pasar, juga disarankan perlu adanya menambah sarana / prasarana dan penambahan anggaran pengawasan pasar.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini disampaikan, dan guna kesempurnaan laporan ini saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangatlah diharapkan demi terwujudnya Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nias Selatan



E. Martin Ley, SE., MM
Pembina Tk.I

NIP. 19750316 199803 1 007



L A M P I R A N